BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Edisi : 19 Februari 2008
Subyek : Kebakaran Hutan
Halaman : 27

KEBAKARAN HUTAN

Kualitas Udara Makin Memburuk

Pekanbaru, Kompas - Kebakaran hutan yang melanda sejumlah kota di Provinsi Riau belum dapat diatasi. Dari 23 titik api yang ada di Pulau Sumatera, 10 titik di antaranya ada di Riau.

”Kondisi Dumai terparah disusul Bengkalis, Rokan Hilir, dan Siak. Kualitas udara memburuk di Pekanbaru. Kabut asap diperkirakan akan bergerak ke Sumatera Barat,” ujar Yohanes Drajat Bintoro, Kepala Bidang Analisa Badan Meteorologi dan Geofisika, Pekanbaru, Senin (18/1).

Untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan, Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan Medis dan Gizi Dinas Kesehatan Riau Burhanuddin Agung mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas luar ruang.

Sejauh ini masyarakat masih melakukan kegiatan seperti biasa dan tanpa mengenakan masker.

Kepala Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Dumai yang juga Wakil Wali Kota Dumai Sunaryo menuturkan, Senin ada bantuan helikopter dari Departemen Kehutanan untuk memadamkan api.

Komandan Lapangan Satkorlak Dumai, Jusman, mengatakan, kebakaran yang dekat dengan permukiman penduduk terjadi di wilayah Klinsing, Kilometer (km) 26, Km 40 dan Km 25 ke arah Kota Dumai. Sampai Senin siang, tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kawasan Industri Dumai serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Kehutanan yang berjumlah sekitar 250 orang masih memadamkan api.

Di Jambi, aksi pembakaran lahan mulai marak. Tim Manggala Agni sudah dikerahkan untuk memadamkan api, Senin.

Kepala Dinas Kehutanan, Budidaya mengatakan, melalui pemantauan udara, Minggu (17/2), pihaknya mendapati 15 titik pembakaran lahan tersebar di areal hutan eks HPH Asialog di Kabupaten Batanghari, dan areal HTI PT Wira Karya Sakti, anak perusahaan grup Sinas Mas di Kabupaten Tebo, yang diduduki para perambah.

Sementara itu, para aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Demikian Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Isal Wardhana, Senin, karena hal itu bisa mengancam kelestarian hutan. (SAH/ITA/BRO)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup